

BAB I**PENDAHULUAN****A.Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah serangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang sedang berkembang, dan akan terus melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu proses perubahan sosial menuju ke tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni urusan absolute, urusan konkuren dan urusan pemerintah umum. Urusan absolute adalah urusan yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan konkuren adalah

urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangannya oleh presiden. Dalam semesta pembagian urusan ini. Desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah provinsi dan peraturan bupati/walikota jika yang memberikan tugas adalah pemerintah kabupaten/kota.

Titik berat pembangunan negara Indonesia secara substansial diarahkan pada pencapaian daya guna dan hasil guna sebagai gerak utama dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pembangunan nasional dewasa ini dimaksudkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, sehingga hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik pusat maupun di daerah bukan sampai kelompok desa. Penerapan pembangunan di wilayah bagaikan bagian dari pembangunan nasional yang bersumber pada prinsip otonomi wilayah. Otonomi wilayah merupakan sesuatu kondisi yang membolehkan wilayah mengaktualisasikan seluruh kemampuan terbaik yang dimilikinya secara maksimal.

Penerapan otonomi wilayah membuat warga di wilayah mandiri dalam melakukan pembangunan daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Disitu sisi

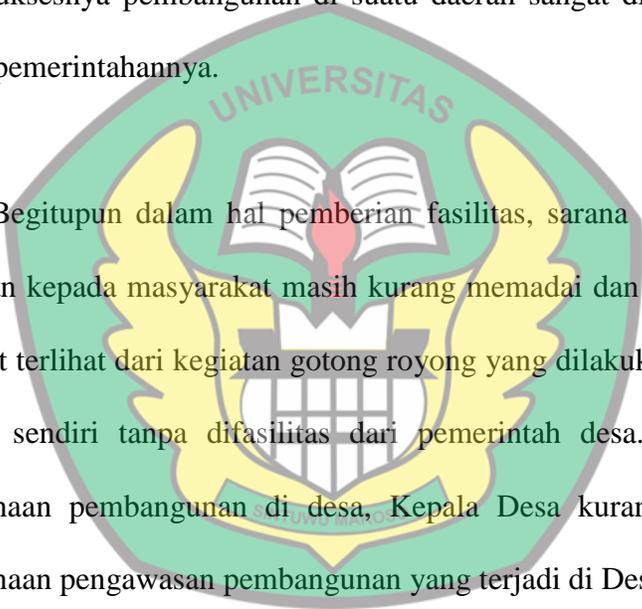
kebebasan berkereasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. masalah yang berat adalah mengubah pola pembangunan dan dari sentralisasi berubah menjadi desentralisasi, misalnya sumber daya untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksanaan untuk aktifitas pembangunan dan masih banyak lain. Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa mengacu pada dua pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasaranapembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa ialah sesuatu proses yang berlangsung di desa serta ialah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta penghidupan warga. Dalam konteks pembangunan, dalam pemerintah Indonesia dicanangkan bermacam program antara lain semacam program inpres desa tertinggal, program pembangunan infrastruktur pedesaan, programalokasi dana Desa, program PNPM serta sebagainya. Seluruh program spesial ini bertujuan buat memesatkan upaya pembangunan di wilayah pedesaan.

Bersumber pada Undang- undang tersebut jelas diamanatkan kepada kepala desa buat menyelenggarakan pembangunan desa, pastinya dengan seluruh kapasitas yang diberikan kepada salah satunya menggunakan partisipasi warga. Buat menggerakkan warga dalam partisipasinya terhadap pembangunan, dibutuhkan terdapatnya tenaga/ faktor penggerak yang sanggup menggerakkan serta memusatkan keahlian warga buat bisa mewujudkan cita- cita pembangunan dalam ikatan ini, hingga kepala desa bagaikan pucuk pimpinan desa memegang peranan yang ditetapkan.

Sebagai pimpinan paling tinggi serta penanggung jawab penerapan pemerintahan serta pembangunan, dia wajib mampu mengembang tugas yang dibebankan kepadanya yang silih kait- mengkait tercantum tugas pembangunan yang multi dimensional. Bagi pengamatan sedangkan penulis yang terjalin di Desa Toyado adalah, peran dari kepala desa dan perangkat desa periode 2012-2019 dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah bahkan seolah tidak terlihat fungsinya dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa, beberapa infrastruktur di Desa Toyado sendiri sudah banyak yang rusak seperti, pemeliharaan rumah ibadah, pembenahan ulang baruga, pembenahan balai desadan perbaikan jalan untuk akses masyarakat menuju ke perkebunan karena mayoritas masyarakat Desa Toyado berprofesi sebagai petani namun permasalahan yang paling mendasar di Desa Toyado ini adalah susahnya air bersih didalam desa tersebut khususnya di

Dusun satu, sehingga mengharuskan masyarakat menggunakan air sungai dan sumur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti mandi, cuci dan kakus. Hal ini menuntut pemerintah untuk melaksanakan pembangunan saluran air, Peran kepala desa sangat menentukan dalam pembangunan desa. Oleh karena itulah suksesnya pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya.



Begitupun dalam hal pemberian fasilitas, sarana dan infrastruktur yang diberikan kepada masyarakat masih kurang memadai dan kurang maksimal. Hal itu dapat terlihat dari kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat dengan inisiatif sendiri tanpa difasilitasi dari pemerintah desa. Sama halnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa, Kepala Desa kurang aktif dalam proses pelaksanaan pengawasan pembangunan yang terjadi di Desa Toyado itu sendiri.

Bertitik tolak dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, Terutama di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso maka peneliti bermaksud meneliti penelitian **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti berusaha merumuskan masalah yang ingin diteliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang diperlukan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepala desa Dalam pembangunan di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran kepala desa Dalam pembangunan di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso?
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Toyado Kecamatan Lage Kabupaten Poso?

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat dieproleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara akademis

Penelitian ini dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk meneliti masalah yang lain yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pembangunan desa.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu bagi aparatur pemerintahan maupun masyarakat.

